



ANALISIS POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA DI ERA PRESIDEN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Najwa Azhar Muta'al¹,
Ali Noer Zaman²

¹⁻²Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah
Jakarta

Article history

Received: 25 Agustus 2024

Revised: 26 Agustus 2024

Accepted: 27 Agustus 2024

*Corresponding author

azhar.mutaal01@gmail.com

Abstrak

Politik Luar Negeri merupakan sebuah hasil kebijakan yang di dasari oleh kebutuhan nasional sebuah negara. Dalam melaksanakan Politik Luar Negeri Presiden SBY mengedepankan motto "Thousand friends zero enemy" sehingga dalam pelaksanaannya Indonesia di bawah Pemerintahan SBY melakukan berbagai upaya agar terus aktif di dunia Internasional. Hal-hal seperti diplomasi, konferensi, dan kerjasama internasional dilakukan dengan mengedepankan perdamaian. Sehingga Indonesia memiliki wajah baru di dunia internasional sebagai negara yang mengedepankan perdamaian. Isu internasional seperti terorisme dan konflik yang terjadi menjadi sarana pengambilan peran sebagai jembatan bagi negara yang berkonflik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa dan mengobservasi kebijakan luar negeri selama masa jabatan SBY, dengan mempertimbangkan kebijakan nasional dan internasional. Teori liberalisme dan politik luar negeri digunakan untuk mengevaluasi studi ini. Metode kualitatif digunakan untuk melakukan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri pemerintahan SBY terlalu fokus pada peningkatan citra Indonesia di mata dunia. Oleh karena itu, kebijakan nasional tidak mendapatkan perhatian penuh. Hal ini mempengaruhi penilaian dunia Internasional yaitu, menghasilkan citra Indonesia sebagai negara yang kurang tegas dalam pengambilan keputusan.
Kata Kunci: *Politik Luar Negeri, SBY, Thousand Friends Zero Enemy*

Abstract

Foreign policy is the result of a policy based on the national needs of a country. In implementing foreign policy, President SBY put forward the motto "Thousand Friends Zero Enemy". So that in its implementation Indonesia under the SBY Government made various efforts to continue to be active in the international world. Things like diplomacy, conference, and international cooperation are carried out by promoting peace. So that Indonesia has a new face in the international world as a country that promotes peace. International issues such as terrorism and conflicts that occur become a means of taking a role as a bridge for country in conflict. This research aims to analyze the foreign policy during the reign of President SBY through both national and international policies. The theory used to analyze this research is the theory of liberalism and foreign policy. This research is conducted using qualitative method. The result of this study shows that the foreign policy in SBY administration is too focused on restoring Indonesia's image in the international world so that national policies that are the basis for determining of Indonesia's foreign policy, do not get full attention and effect the assessment on the international world. Resulting in the image of Indonesia as a country that is less assertive in making decision.

Keywords: *Foreign Policy, SBY, Thousand Friends Zero Enemy*

PENDAHULUAN

Politik luar negeri adalah perhitungan-perhitungan yang dibuat para pengambil keputusan sebagai respon terhadap lingkungan luar masyarakat (Jensen, 1982). Pengertian politik luar negeri tersebut memperjelas bahwa politik luar negeri memiliki hubungan yang melibatkan perhitungan dalam pengambilan keputusan pada suatu hal yang terjadi pada masyarakat luar. Politik luar negeri mempertimbangkan dan mengedepankan kepentingan nasional sebuah negara. Upaya ini dilakukan untuk mengatur hubungan luar negeri dengan memprioritaskan kepentingan nasional sebuah negara. Kebijakan luar negeri dalam politik luar negeri merupakan kebijakan yang menentukan cara sebuah negara menghadapi kekuatan dari eksternal. Kondisi eksternal yang dimaksud diperoleh dari nilai-nilai yang dialami dari peristiwa sejarah dan hal-hal yang dapat menjadi penentu posisi dalam politik internasional (Rosenau, 1974).

Indonesia merupakan negara yang menjalankan politik luar negeri dengan berbagai perubahan. Hal ini dipengaruhi oleh sistem politik, perubahan rezim, sampai kondisi politik internasional. Dengan demikian terjadi beberapa prinsip yang dapat terus dilakukan dan diberhentikan pada masa tertentu. Dalam menjalankan kebijakan luar negeri Indonesia, Presiden SBY tentu memiliki ciri khas tersendiri. Slogan "Thousand Friends Zero Enemy" menjadi wajah dari Politik Luar Negeri Indonesia. Slogan ini dibuat untuk menciptakan citra Indonesia yang lebih "ramah" untuk dunia internasional, hal ini dikarenakan perbedaan kebijakan dan sistem politik dari era sebelumnya. Sehingga diperlukan citra baru bagi Indonesia dalam menjalankan kepentingannya dengan dunia Internasional (Effendy, 2017).

Presiden SBY menjabat di era reformasi, dengan demikian perubahan kebijakan dari era orde baru yang mengalami kecenderungan kepada Blok Barat meskipun Indonesia masih berpegang teguh pada identitasnya yang "bebas aktif", berubah dengan mengembalikan kepada identitas "bebas aktif" dengan tidak memiliki kecenderungan pada satu blok, menyesuaikan prinsip non-blok. Membuka kesempatan untuk melakukan diplomasi, kegiatan ekonomi internasional, upaya pertahanan dan kegiatan global lainnya dengan berbagai negara tanpa batas. Hal ini yang merupakan upaya pengembalian citra Indonesia di mata internasional tentang prinsip politik luar negerinya. (Harini, 2019). Selama masa pemerintahan Presiden SBY terjadi beberapa isu di dunia internasional diantaranya adalah, konflik laut China Selatan, terorisme, lingkungan hidup, dan demokrasi. Isu-isu ini mempengaruhi kebijakan-kebijakan dan sikap Indonesia dalam hubungan internasional dan politik luar negerinya. Presiden SBY yang mengedepankan *soft power* menjadikan sikap Indonesia di berbagai konflik mengambil peranan sebagai penengah atau *peace maker*. Menggunakan dan mengedepankan diplomasi dibandingkan dengan penggunaan kekuatan militer dalam berbagai konflik merupakan wujud dari apa yang dimaksud dengan *soft power*.

Untuk menunjang penelitian ini peneliti melakukan analisis melalui riset terhadap penelitian terdahulu yang memiliki tema yang serupa dengan perbedaan pada teori ataupun tahun dari objek yang diteliti. Penelitian yang ditulis oleh Tonny Dian Effendy dengan judul "Memahami Politik Luar Negeri Indonesia Era Susilo Bambang Yudhoyono secara Komprehensif : Resensi Buku" penelitian ini ditulis berdasarkan buku "Indonesia Dalam Pusaran Global : Politik Luar Negeri Susilo Bambang Yudhoyono". Penelitian ini menjelaskan bahwa dalam buku tersebut penggambaran poin tentang Polugri atau kebijakan luar negeri masa

SBY disajikan sangat detail. Buku ini dianggap penting karena buku ini meneliti Polugri Indonesia pada masa pemerintahan SBY dengan menggunakan dua metode konseptual dan material. Objek penelitian yang digunakan penulis sama dengan objek yang digunakan dalam penelitian ini. Perbedaan nya terdapat pada metode penelitian yaitu penelitian ini di tulis dengan metode *library research* sedangkan penelitian oleh Tonny Dian ditulis dengan cara meresensi buku.

Penelitian lain yang peneliti gunakan sebagai bahan analisis adalah penelitian yang ditulis oleh Ganjar Widhiyoga dan Setyasih Harini dengan judul penelitian "Identitas Politik Luar Negeri Indonesia di Masa Reformasi (1999-2004)". Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teori *role theory*. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa subjek dalam penelitian ini yaitu tiga presiden era reformasi memiliki gaya masing-masing dalam menentukan Polugri Indonesia. Persamaan pada penelitian yang dilakukan penulis terletak pada politik luar negeri sebagai objek penelitian dan subjek yang di teliti merupakan hal yang menjadi pembeda pengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian yang penulis teliti berfokus pada Presiden SBY. Sedangkan penelitian ini mengambil tiga Presiden sebagai bahan studi.

METODE

Metode kualitatif menjadi metode penelitian yang penulis pilih untuk melakukan studi karena, penelitian kualitatif menggunakan data dengan mayoritasnya berasal dari informasi non numerik seperti teks, gambar, diagram, vidio, audio dan data non numerik lainnya. Penelitian dengan metode kualitatif dapat menghadapi tingkat kesulitan pada data dengan makna yang beragam. Pengelolaan data pada penelitian kualitatif dapat menentukan hasil terhadap penelitian yang dijalankan, dengan demikian dibutuhkan penanganan khusus terhadap banyaknya informasi. Data yang diperoleh dalam penelitian kualitatif adalah fenomena asli, sedangkan penelitian kuantitatif mengalami reduksi ke dalam angka (Sarosa, 2021). Hal ini menjadikan penelitian kualitatif cocok ke dalam peristiwa sosial yang terjadi di dunia nyata. Peristiwa politik dalam penelitian ini merupakan fenomena yang telah terjadi sehingga metode kualitatif menjadi pilihan penulis untuk penelitian ini.

Adapun perbedaan metode kuantitatif dengan kualitatif adalah : (1) Latar belakang dan rumusan masalah pada penelitian dengan metode kuantitatif pendahuluan yang disajikan berupa data statistik. Sedangkan kualitatif berupa hasil survei tanpa data statistik dan berfokus memaparkan tujuan penelitian ; (2) Tujuan dan manfaat penelitian dibedakan dengan, kuantitatif menampilkan pernyataan yang ditujukan untuk mengetahui substansi yang jelas, sedangkan kualitatif berfokus pada tujuan yang perlu dicapai yang mencakup konteks sosial budaya dan perilaku responden ; (3) penelitian dengan metode kuantitatif berisi hipotesis dan pengujian yang berupa statistik, sedangkan kualitatif disajikan diantaranya analisa bahasa, FGD, data sekunder dan etnografis ; (4) Hipotesis dan variabel pada kuantitatif berupa hasil perumusan statistik atau skala rasio. Dan kualitatif berupa dugaan hasil pemahaman, analisa, dan deskripsi (Musianto, 2002).

Observasi terhadap buku, artikel ilmiah, dan dokumen digital yang berkaitan dengan tema penelitian atau disebut sebagai teknik *non human source of information* merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini (Yusuf, 2014). Penelitian ini menggunakan pendekatan *library research* atau penelitian kepustakaan. Pendekatan ini melibatkan kajian teoritis serta analisis acuan dan bacaan ilmiah yang berhubungan dengan budaya, norma, dan nilai dalam konteks sosial yang diteliti. *Library research* merupakan kumpulan informasi terhadap buku, kepustakaan, dan catatan yang relevan dengan topik penelitian (Sugiyono, 2021).

KERANGKA TEORITIS

Dalam menjalankan Politik Luar Negeri, perlu menganalisis kepentingan nasional sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan sesuai kebutuhan sebuah negara. Dalam teori Liberalisme kebijakan luar negeri di pandang sebagai sebuah langkah optimis. Rasionalitas dan akal sehat manusia dapat digunakan dalam hubungan internasional. Teori ini tidak membantah adanya sifat manusia yang kompetitif, dan percaya bahwa manusia memiliki banyak kepentingan, sehingga dapat terlibat dalam tindakan sosial yang menghasilkan kolaborasi di dalam negeri dan luar negeri sehingga dapat menguntungkan berbagai pihak (Soresen, Moler, & Jackson, 2022).

Teori Politik Luar Negeri merupakan sekumpulan aturan yang diterapkan oleh negara sebagai pengelola hubungan internasionalnya. Yang merupakan bagian dari kebijakan nasional dan dirancang untuk mendukung tujuan tertentu, terutama tujuan yang relevan dengan situasi yang sedang dihadapi, sering kali disebut kebijakan nasional. Politik Luar Negeri pada dasarnya adalah tanggapan atau pola sikap terhadap lingkungan ekologisnya. Hal ini dipengaruhi oleh interaksi dengan persepsi, pengalaman, sumber daya alam, dan kebudayaan politik yang tertuang ke dalam konstitusi (Prawirasaputra, 1984). Dalam Politik Luar Negeri beberapa variabel yang mendukung pertimbangan pemerintah untuk menentukan rencana dalam mengatur Polugri Indonesia, yaitu ; (1) Memetakan struktur jaringan internasional yang merujuk pada suatu keadaan dimana terdapat pola dominasi, ketidakseimbangan kedudukan, dan *leadership*; (2) Rencana kebijakan luar negeri secara umum sangat dipengaruhi oleh faktor kemasyarakatan dan perekonomian dalam negeri serta perilaku dalam negeri ; (3) Pandangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah sebagai pembuat undang-undang untuk menghadapi situasi yang mengancam kedaulatan nasional juga berperan penting ; (4) Sumber daya alam yang dimiliki yang juga dipengaruhi oleh letak geografis dapat menjadi pertimbangan pemerintah dalam menentukan strategi Politik Luar Negeri suatu negara (Holsti, 1987).

HASIL DAN DISKUSI

Profil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono



Gambar 1: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Pemilihan umum (Pemilu) pada tahun 2004 dimana merupakan pemilihan langsung pertama secara demokratis, dimana presiden SBY terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2004-2009. Setelah satu periode menjabat Presiden SBY kembali mengikuti dan terpilih pada Pemilu 2009. Raden Soekotjo dan Siti Habibah adalah orang tua kandung presiden SBY, dan beliau merupakan anak tunggal yang lahir pada 9 September 1949. Lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI) sebagai lulusan terbaik dengan nama penghargaan Adhi Makayasa. Penghargaan ini diberikan atas kemampuan fisik, mental, dan intelektual yang mumpuni. SBY memulai karir politiknya dengan memasuki badan legislatif sebagai badan pekerja dari fraksi MPR dari TNI/Polri periode 1997-1998. Ketika kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid, SBY memulai karir politik di badan eksekutif sebagai Menteri Pertambangan dan Energi periode 1999-2000. Pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri, SBY diberikan amanat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) yang kemudian mundur untuk fokus pada pencalonan Presiden di Pilpres 2004. (Kompas, 2018).

Presiden SBY juga dikenal sebagai seorang dengan jiwa seni yang tinggi. Memiliki ketertarikan dengan seni, Presiden SBY sudah menciptakan beberapa lagu yang juga di tampilkan di acara formal seperti acara kenegaraan ataupun acara non formal. Beberapa lagu yang beliau ciptakan di antaranya, "*Kembali*", "*Berkelana ke Ujung Dunia*", dan "*Malam Sunyi di Cipaganti*". Selain lagu karya seni lain yang diciptakan oleh Presiden SBY berupa tembang, tembang berbahasa jawa berjudul "*Gunung Limo*" berlatar belakang cerita kenangan Presiden SBY dengan Istri beliau alharhumah Ani Yudhoyono. Karya seni lainnya adalah lukisan. Beberapa lukisan Presiden SBY telah dikenal di masyarakat yang di unggah di media sosial Instagram pribadinya. Dua lukisan yang terkenal berjudul "*I*

Understand More the Meaning of Life” dan *“Diilhami Pacitan”*. Hal ini menunjukkan sisi lain dari citra Presiden SBY yang lekat dikenal sebagai seorang politisi dan aktif di bidang militer (Aulia, 2022).



Gambar 2 : SBY dan lukisan (Aulia, 2022)

Politik Luar Negeri Indonesia masa pemerintahan SBY

Pada periode pemerintahan Presiden SBY, Politik Luar Negeri Indonesia mengedepankan *soft power* sebagai kekuatan bagi pemenuhan kepentingan nasional Indonesia. Hal ini didasari oleh beberapa faktor, contohnya adalah gaya kepemimpinan Presiden SBY yang sering disebut menghindari konflik terbuka. Studi kasus untuk gaya kepemimpinan Presiden SBY terlihat pada kasus Bank Century dimana pada masa jabatannya sistem yang digunakan adalah kombinasi sistem presidensial dan multipartai. Sehingga pada masa pemerintahan SBY kondisi politik dalam negeri antara lembaga eksekutif dan legislatif tidak terjadi *political deadlock*. Hal ini diaplikasikan pada kasus Bank Century dimana terdapat tiga partai anggota koalisi pendukung presiden yaitu, Golkar, PKS, dan PPP yang melanggar kesepakatan. Namun, dengan prinsip menghindari konflik terbuka, Presiden SBY tidak memberikan respon untuk memberhentikan ketiga anggota partai tersebut dari jajaran kabinet. Melainkan, memutuskan membuat kebijakan untuk tetap bekerja sama dan mengangkat ketua umum Partai Golkar sebagai Ketua Harian Setgab untuk penyelesaian kasus Bank Century (Jalal, 2021).

Faktor kedua yang merupakan faktor eksternal, yaitu keadaan atau situasi internasional yang mempengaruhi kebijakan nasional. Pada tahun 2009 Presiden SBY menyuarakan *“No country percieve Indonesia can exercise foreign policy freely in all directions, having a million friends and zero enemies”*. Pernyataan berikut merupakan sebuah respon dan prinsip untuk Politik Luar Negeri Indonesia sebagai citra bahwa Indonesia kini memperluas pertemanan dan menghindari konflik (Rizky, Ganesh, & Ardhani, 2018). Beberapa konflik internasional yang terjadi pada masa pemerintahan

Presiden SBY antara lain, Konflik Laut China Selatan (LCS) yang sudah terjadi sejak 1947, melalui peta yang dikeluarkan China, mereka menunjukkan bahwa kawasan Paracel dan Spratly termasuk kedalam wilayah mereka. Namun, hal ini di sanggah oleh negara-negara di sekitarnya yaitu Vietnam, Filipina, Malaysia dan Brunei Darussalam. Masing-masing negara memiliki keyakinan berdasarkan sejarah, dokumen, dan Konvesi yang di rilis oleh PBB tentang hukum laut pada tahun 1982. Sumber daya alam merupakan hal yang mendasari konflik di kawasan tersebut. Penelitian menurut ilmuan International Energy Agency (EIA) terdapat cadangan besar gas alam yang perkiraan jumlahnya 900 triliun kaki kubik. Dan kawasan tersebut merupakan rute utama perkapalan bagi masyarakat sekitar (BBC, 2011)

Di bawah masa kepemimpinan SBY, Indonesia bertindak sebagai mediator dan dengan konsisten memprioritaskan penyelesaian secara damai. Dalam forum KTT ASEAN ke-24 di Myanmar, Presiden SBY menyatakan bahwa Indoensia secara moral merasa terdorong untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian konflik LCS. Kepedulian terhadap isu LCS merupakan aplikasi dari prinsip Politik Luar Negeri Indonesia era SBY yang mengedepankan pertemanan dan meminimalisir musuh dan konflik. Keaktifan Indonesia dalam isu ini menjadi sebuah upaya diplomasi. Dan mengharapkan lancarnya diplomasi dengan negara kawasan dan luar kawasan sehingga dapat memajukan berbagai sektor yang menjadi fokus kepentingan nasional. Serta mengembalikan dan membangun citra di masyarakat global (Gunawan, 2014). Dalam isu terorisme, Indonesia di bawah kepemimpinan SBY secara tegas menyuarakan penolakan terhadap terorisme dan menegaskan posisinya dengan mayoritas penduduk muslim di dunia, yang menjadikan Indonesia perlu bersuara kepada penolakan aksi terorisme. Langkah nyata dari sikap anti-terorisme ini terlihat dengan partisipasi Indonesia dalam Asia Pasific Economy Cooperation (APEC) Counter Terrorism Task Force dan keaktifan Indonesia di dalamnya. SBY menggarisbawahi bahwa ajaran Islam menentang segala bentuk ekstrimisme. Hal ini disampaikan saat bertemu dengan Sekretaris Jendral Organisasi Kerjasama Islam (OKI), Iyad Ameen Madani, pada konferensi ke-6 di Bali tahun 2014 oleh United Nation Alliance of Civillization (Maulana, 2014).

Dalam menjalankan Politik Luar Negerinya SBY memiliki tiga strategi utama yaitu ; (1) Indonesia memprioritaskan komunitas regional dengan menekankan multilateralisme, yang tercermin dari keikutsertaan Indonesia dalam pertemuan-pertemuan multilateral; (2) Dalam kebijakan luar negeri Indonesia di bawah pemerintahan SBY, Indonesia juga memberikan perhatian terhadap hubungan kepada negara berkekuatan besar seperti China, Korea Selatan, Jepang dan Amerika Serikat ; (3) Indonesia secara terbuka berpartisipasi dan menyuarakan terhadap persoalan tingkat dunia seperti perekonomian, ketahanan pangan, dan isu lingkungan (Aulia, 2022). Indonesia sebagai sebuah negara yang mempunyai prinsip pada Politik Luar Negeri, dalam prakteknya khususnya diplomasi Indonesia dikategorikan sebagai negara *middle power*. Kategorisasi ini digolongkan berdasarkan posisi yang di miliki indonesia di berbagai aspek di wilayah Asia Pasifik. Beberapa indikator penentu Indonesia sebagai negara *middle power*, diantaranya populasi, teritori, biaya keamanan, Produk Domestik

Bruto, hasil perdagangan keluar atau ke dalam negeri, dan angka harapan hidup (Ruhama, 2016).

Negara *middle power* juga dinilai berdasarkan perilaku sebuah negara dalam melaksanakan hubungan internasionalnya. Keterlibatan untuk berperan aktif dalam dunia internasional dapat menjadi tolak ukur. Seperti menjadi penengah atau jembatan bagi negara-negara lain. Khususnya negara dengan kategori yang berbeda yaitu *great power* dan *small power*. Dalam hal ini di masa pemerintahan Presiden SBY di kategorikan sebagai negara *middle power* yang aktif dalam forum multilateral. Contoh upaya yang dilakukan sebagai negara *middle power* di dunia internasional seperti berperan sebagai negara fasilitator, mewujudkan citra *good international citizenship*, dan *cooperation building*. Tujuan dari upaya ini untuk mengatasi berbagai permasalahan di dunia internasional. Peran-peran ini diambil sebagai upaya untuk memudahkan Indonesia untuk berteman dengan berbagai negara di semua wilayah (Flemes, 2007). Fasilitator dalam sebuah konflik bagi negara lain yang merupakan upaya negara *middle power* baik bilateral atau multilateral telah dilakukan oleh Indonesia. Khususnya di era pemerintahan Presiden SBY yang salah satu bentuknya adalah diplomasi. Diplomasi merupakan sebuah kekuatan bagi suatu negara untuk mencapai suatu tujuan. Diplomasi dikategorikan sebagai *soft power* karena tidak menggunakan kekerasan dalam pelaksanaannya. Di era pemerintahan SBY diplomasi dilakukan untuk mencapai kepentingan nasional Indonesia. Salah satunya adalah isu integrasi teritorial Indonesia. Di era SBY penyelesaian yang dilakukan untuk melindungi teritorial Indonesia dilakukan dengan cara damai. Penyelesaian konflik dilakukan dengan berdialog langsung bersama negara-negara terkait dengan terus menekan ketegangan yang terjadi. Hal ini dapat dilihat atas metode penyelesaian di sengketa Indonesia dengan Malaysia dan Filipina. Dalam konflik wilayah dengan Malaysia SBY menekankan bahwa perang merupakan opsi terakhir jika upaya damai mengalami kegagalan dan menyatakan bahwa Indonesia mengutamakan solusi damai, dengan berbicara kepada negara lain untuk didengar. Dan perang merupakan opsi terakhir dari upaya penyelesaian konflik (Sindonews, 2011). Meskipun hal ini bukan merupakan sebuah contoh yang menggambarkan Indonesia sebagai fasilitator untuk mencapai kesepakatan, namun citra untuk menunjukkan Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi perdamaian yang beradab dan taat pada norma dunia. Pengembangan citra ini sesuai dengan ciri negara *middle power* yang berperan sebagai *good international citizenship*.

Selain di sektor teritorial Indonesia di bawah kepemimpinan SBY aktif mengajukan pertemuan-pertemuan guna menyelesaikan atau melakukan pertukaran pandangan terhadap sebuah isu internasional. Salah satu isu yang diangkat dengan Indonesia sebagai pemberi usulan, adalah untuk membentuk *Bali Democracy Forum* (BDF). BDF dibentuk atas upaya menguatkan nilai-nilai demokrasi bagi negara-negara Asia-Pasific. Forum ini digunakan sebagai wadah pertukaran wawasan bagi negara anggota mengenai demokrasi. Hal ini dilakukan sebagai pernyataan sikap bahwa Indonesia tegas terhadap isu HAM dan demokrasi dalam dunia internasional. Dan tidak menoleransi bentuk pelanggaran terhadap hal-hal tersebut. BDF telah diselenggarakan sejak tahun 2008

dengan peserta dan pengamat 28 negara dan mengalami penambahan menjadi 128 negara di tahun 2013. Dan forum ini telah melaksanakan 15 kali pertemuan hingga tahun 2022. Hal ini menunjukkan respon positif dari dunia internasional terhadap keaktifan Indonesia. Selain meningkatnya jumlah anggota BDF memperoleh perluasan dalam cakupan delegasi. Dengan awal perencanaan BDF bagi Asia-Pasific, kini meluas ke berbagai kawasan. Dengan demikian hadir nya forum ini diakui tidak hanya di regional, tapi juga di tingkat global (Djemat, 2021).

Terorisme merupakan sebuah peristiwa besar yang terjadi di masa pemerintahan SBY. Peristiwa 9/11 merupakan tragedi yang mengguncang dunia internasional, khususnya negara dengan masyarakat penganut agama Islam. Hal ini menjadi salah satu perhatian SBY karena di dunia Indonesia sebagai mayoritas dengan penduduk muslim. Dengan demikian strategi Politik Luar Negeri Indonesia perlu dilakukan penguatan dan inovasi demi menjaga stabilitas dan nama baik Indonesia di mata internasional. Hal ini penting dilakukan demi tercapainya kelancaran hubungan internasional Indonesia. Presiden SBY melakukan upaya dengan ikut berpartisipasi dalam forum global dengan bidang anti terorisme. Sebagai pernyataan sikap Indonesia sebagai negara yang tidak membenarkan aksi terorisme. SBY juga aktif menjalin kedekatan kepada semua negara tanpa memandang agama dengan maksud menumbuhkan persaudaraan antar negara dan mempertahankan kerjasama yang telah terjalin sebelumnya. Hal ini sejalan dengan prinsip Polugri yang dilakukan untuk memenuhi tujuan negara. Dalam hal ini selain mempertahankan citra Indonesia upaya ini dilakukan untuk membentuk hubungan yang lebih kuat dan terpercaya (Widatmadja & Albab, 2019).

SBY secara aktif telah melakukan berbagai komitmen di lingkup internasional dan telah di realisasikan ke dalam kebijakan nasional. Salah satu kebijakan nasional Indonesia yang diangkat dari isu internasional adalah isu perubahan iklim. Selain membuat kebijakan perihal perubahan iklim SBY juga membentuk lembaga dan menyelenggarakan konferensi internasional yang berkaitan dengan perubahan iklim. *Conference of The Parties* (COP) yang merupakan konferensi tingkat tinggi oleh *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) merupakan salah satu konferensi yang berhasil di selenggarakan di Indonesia. Di putuskan sebagai tuan rumah Indonesia meluncurkan *Bali Action Plan* dan *Bali Road Map* pada COP ke 13. SBY pada 2009 melakukan komitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 26-41%, meskipun Indonesia tidak berkewajiban melakukan pengurangan emisi gas kaca tersebut. Namun, hal ini dilakukan untuk menunjukkan peran Indonesia yang aktif dalam upaya global khususnya isu perubahan iklim (Sinaga, 2020).

Table 1. Timeline of Indonesia's Climate Change Policy 2004-2014

Year	Policy Development	Institutions and other Initiatives
2004		Ratifying the Kyoto Protocol by Law No 17
2005		Establishing Designated National Authority (DNA)-Clean Development Mechanism (CDM)
2006	Presidential Decree No 5 on National Energy Policy	
2007	Long-term National Development Program (RPJP 2005-2025) by Law No 17	Hosting Conference of the Parties (COP) 13 in Bali and Resulted Bali Action Plan and Bali Road Map
2008	National Development Planning Response to Climate Change ("Yellow Book")	Establishing National Council on Climate Change by President Instruction No 46; Establishing National Energy Council by Presidential Regulation No 26
2009	Economic and Fiscal Policy Strategies for Climate Change Mitigation ("Green Paper"); Mid-term National Development Program (RPJMN 2010-2014)	Law No 32 on Protection and Management of Environment; Establishing Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF); Hosting World Ocean Conference in Manado
2010	Indonesia Climate Change Sectoral Roadmap (ICCSR)	Promotion of Adaptation Section Parallel to Mitigation at the Ministry of Environment; Establishing Indonesia Green Investment Fund (IGIF); Signing Letter of Intent (LoI) between Norway Government and Indonesian Government to support Indonesia reducing GHG emissions
2011	National Action Plan on Greenhouse Gas (GHGs) by Presidential Decree No 61/2011; Presidential Decree No 71/2011 on GHGs Emission Inventory; and Guideline for Developing Local Action for GHGs reduction; Presidential Instruction No 11 on Moratorium on the Issuance of Permits For Primary Forests and Peatlands	Second National Communication; Establishing REDD+ Task Force by Presidential Decree No 25
2012	Local Action Plan on Climate Change	Establishing REDD+ National Strategy
2013	National Action Plan on Climate Change Adaptation; Presidential Instruction No 6 on Moratorium on the Issuance of Permits For Primary Forests and Peatlands	Establishing Management Agency on REDD+ by Presidential Decree No 6

Gambar 3: Timeline of Indonesia's Climate Change Policy 2004-2014 (Sinaga, 2020)

Diantara upaya yang dilakukan Presiden SBY di era pemerintahannya dalam menjalankan Politik Luar Negeri Indonesia terdapat kelemahan yang menjadikan tujuan awal Politik Luar Negeri Indonesia tidak sesuai targetnya. Hal ini dipengaruhi oleh kelemahan dari prinsip yang di berlakukan oleh SBY, yaitu *Thousand friends zero enemy*. Prinsip ini dinilai tidak tegas dan kurang mengedepankan kepentingan nasional. Sedangkan, Politik Luar Negeri dibuat sebagai pendukung tujuan sebuah negara. Hal ini dapat di lihat dari kebijakan dan respon SBY terhadap isu-isu yang penting dan menyinggung kedaulatan negara, seperti konflik Laut China Selatan dan konflik dengan negara-negara tetangga. Karena mengedepankan proses diplomasi hasil dari perundingan tidak berpihak sepenuhnya kepada Indonesia.

KESIMPULAN

Pemerintahan presiden SBY diwarnai dengan isu-isu nasional dan internasional yang cukup membutuhkan banyak waktu penyelesaian. Dengan pemilihan demokratis pertama presiden SBY dapat membuka politik luar negeri kepada hubungan yang lebih meluas. Dengan mempunyai moto mempunyai relasi atau pertemanan dengan banyak negara-negara dan tidak mendukung konflik. Hal ini telah ditunjukkan dengan bergabungnya Indonesia pada organisasi-organisasi internasional sehingga menunjukkan keseriusan dalam menjalankan politik luar negerinya. Indonesia pada masa pemerintahan presiden SBY juga mengedepankan kerjasama dalam kawasan yakni ASEAN. Program kerja yang di kedepankan dalam membangun ASEAN dibangun dengan baik dilakukan dengan membuat pertemuan-pertemuan internasional sehingga dapat menjadi wadah bagi aktor negara untuk berdiskusi terkait isu-isu tertentu hingga menjadi tempat penyelesaian permasalahan dunia. Motto yang diterapkan selama pemerintahan SBY dinilai memiliki kekurangan dan kelebihan sehingga dapat dijadikan analisis bagi pemerintahan selanjutnya untuk membangun hubungan luar negeri yang lebih mengedepankan kepentingan nasional Indonesia.

REFERENSI

- Aulia, G. (2022). *Profil Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-6 Indonesia*. Hämtat från <https://katadata.co.id/berita/nasional/633187330838b/profil-susilo-bambang-yudhoyono-presiden-ke-6-indonesia>
- BBC. (2011). *Sengketa Kepemilikan Laut China Selatan*. Jakarta: BBC News Indonesia.
- Djemat, Y. O. (2021). Diplomasi Publik Indonesia Melalui Bali Democracy Forum. *Jurnal dinamika global*, 317.
- Effendy, T. D. (2017). Memahami Politik Luar Negeri Indonesia Era Susilo Bambang Yudhoyono secara Komprehensif: Resensi Buku. *ejournal UNDIP*, 77.
- Flemes, D. (2007). Emerging Middle Powers' Soft Balancing Strategy: State and Perspectives of the IBSA Dialogue Forum . *SSRN*, 8.
- Gunawan, R. (2014). *SBY: Indonesia Terdepan Damaikan Konflik Laut China Selatan*. Jakarta: Liputan6.
- Harini, G. W. (2019). Identitas Politik Luar Negeri Indonesia di Masa Reformasi (1999-2014). *Reaserch Fair Unisri*, Vol 3, Number 1, p. 562.
- Holsti, K. d. (1987). *Politik internasional suatu kerangka analisis /K.J. Holsti ; diterjemahkan oleh Wawan Juanda*. Bandung: Binacipta.
- Jalal, A. (2021). Sistem Presidensial Indonesia Masa Kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhonoyo (2004-2014). *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 181.
- Jensen, L. (1982). *Explaining Foreign Policy*. Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall.

- Kompas. (2018). *INFOGRAFIK Serial Presiden: Susilo Bambang Yudhoyono*. Jakarta: Kompas.com.
- Maulana, V. (2014). *Sentil ISIS dan Boko Haram, Sekjen OKI Temui SBY*. Jakarta: SidoNews.com.
- Musianto, L. S. (2002). Perbedaan Pendekatan Kuantitatif dengan Pendekatan Kualitatif Dalam Metode Penelitian. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 135.
- Prawirasaputra, S. (1984). *Politik Luar Negeri Republik Indonesia*. Bandung: Remadja Karya.
- Rizky, A. A., Ganesh, C. P., & Ardhani, I. (2018). Haluan Baru Politik Luar Negeri Indonesia : Perbandingan Diplomasi 'Middle Power' Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. *Jurnal Hubungan Internasional*, 152.
- Rosenau, J. N. (1974). *Comparing Foreign Policies : Theories, Finding and Methods*. New York: John Willey and Sons. Hal.27.
- Ruhama, Z. (2016). Indonesia's Middle Power Project in the Indo-Pacific during the presidencies of Susilo Bambang Yudhoyono and Joko Widodo 2004-2016. *Flinders University Theses*.
- Sarosa, S. (2021). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: PT Kanisius.
- Sinaga, L. C. (2020). Assessing The Commitment of Indonesian Government Towards Climate Change Policy : The Yudhoyono Presidency 2004-2014. *Jurnal Politica*, 167.
- Sindonews. (2011). *Ribut dengan Malaysia, SBY Hindari Jalan Perang*. Sindonews.
- Soresen, G., Moler, J., & Jackson, R. (2022). *Introduction to International Relations: Theories and Approaches eight edition*. Oxford: Oxford University Press.
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Widatmadja, A., & Albab, U. (2019). Indonesia di Era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo : Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Tengah Lingkungan Dinamika Stategis Regional. *Jurnal politica*, 84.
- Yusuf, A. M. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Grup.